

DAMPAK KELAPA SAWIT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

THE IMPACT OF PALM OIL ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT: AN ANALYSIS OF PUBLIC POLICY

Nur Rani^{1*}

¹Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia

*Korespondensi: Nur Rani. Email: nurrani@mail.ugm.ac.id

(Diterima: 30-11-2024; Ditelaah: 24-12-2024; Disetujui: 14-04-2025)

ABSTRACT

Green economy focuses on sustainable development while considering environmental preservation at local, regional, and global levels. This approach supports sustainable economic growth by taking environmental impacts into account, creating job opportunities, and utilizing renewable energy to enhance societal well-being. In Indonesia, the agriculture, plantation, and fisheries sectors contribute 30.32% to GDP and employ 16.2 million workers, with palm oil being one of the main commodities. This study aims to analyze the impact of palm oil on sustainable development from a public policy perspective. Using a qualitative research method based on a literature review, this study examines the role of palm oil within the context of the problem stream, policy stream, and politics stream. The findings indicate that the problem stream includes environmental issues such as deforestation, water pollution, and wildlife population decline, as well as social issues such as land conflicts and community dependence on the palm oil industry, and economic challenges such as financial losses due to European Union policies. The policy stream involves programs such as the B30 biodiesel initiative and ISPO certification, while the politics stream encompasses international pressure, domestic policies, and government commitments to sustainable development through restrictions on new land permits. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis of the integration of the three policy streams in assessing the impact of palm oil, providing insights for strengthening green economy-based policies to support environmental sustainability and societal welfare. Better policies are needed in palm oil management, including improved inter-agency coordination, transparency, and community engagement to promote economic, social, and environmental sustainability.

Key words: Green Economy, Public Policy, Palm Oil, Sustainable Development.

ABSTRAK

Ekonomi hijau berfokus pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan secara lokal, regional, dan global. Pendekatan ini mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, menciptakan lapangan kerja, dan memanfaatkan energi terbarukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan berkontribusi sebesar 30,32% terhadap PDB dengan menyerap 16,2 juta tenaga kerja, di mana kelapa sawit menjadi salah satu komoditas utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kelapa sawit terhadap pembangunan berkelanjutan dari perspektif kebijakan publik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini mengkaji peran kelapa sawit dalam konteks aliran masalah (*problem stream*), aliran kebijakan (*policy stream*), dan aliran politik (*politics stream*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran masalah mencakup isu-isu lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan penurunan populasi satwa, serta masalah sosial seperti konflik lahan dan ketergantungan masyarakat terhadap industri sawit serta masalah ekonomi seperti kerugian ekonomi akibat pengaruh kebijakan Uni Eropa. Aliran kebijakan melibatkan program seperti Biodiesel B30 dan sertifikasi ISPO, sedangkan aliran politik mencakup tekanan internasional, kebijakan domestik, dan komitmen pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan melalui tidak memberikan izin pembukaan lahan baru. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif integrasi tiga aliran kebijakan terhadap dampak kelapa sawit, yang memberikan

wawasan untuk penguatan kebijakan berbasis ekonomi hijau dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang lebih baik diperlukan dalam pengelolaan kelapa sawit, seperti peningkatan koordinasi antar lembaga, transparansi, dan pelibatan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kata kunci: Ekonomi Hijau, Kebijakan Publik, Kelapa Sawit, Pembangunan Berkelanjutan.

Rani, N. (2025). Dampak Kelapa Sawit Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Kebijakan Publik. *Jurnal Governansi*, 11(1): 73-82.

PENDAHULUAN

Ekonomi hijau memandang kebutuhan pembangunan dengan menghormati batasan lingkungan secara lokal, regional, dan global (Nugraha, 2024). Adapun tujuan yang diharapkan dari pertumbuhan ekonomi hijau yaitu ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi yang inklusif dan merata, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, ekosistem sehat dan produktif serta pengurangan emisi gas rumah kaca. Manfaat dari ekonomi hijau menurut (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), 2022), yaitu memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan rendahnya dampak lingkungan, menciptakan lapangan kerja yang berfokus pada energi terbarukan dan teknologi hijau dengan tetap memperhatikan ekonomi lokal (World Bank, 2021), meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan generasi selanjutnya (Global Green Growth Institute, 2022).

Menurut Siregar dalam (IPOSS, 2024), kelapa sawit merupakan komoditas hasil perkebunan yang memiliki peran dalam perekonomian nasional dan mampu menyerap 16,2 juta pekerja. IPOSS juga menyatakan bahwa pasca implementasi program biodiesel berbahan baku sawit, pemerintah berhasil mengurangi kebutuhan impor bahan bakar minyak karena kelapa sawit sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan dan rendah emisi (Hidayat, 2020; IPOSS, 2024). Dengan banyaknya *Crude Palm Oil* (CPO) yang dihasilkan perkembangan ekspor sawit Indonesia telah menjangkau benua Asia, Afrika,

Australia, Amerika dan Eropa (BPS, 2023). Volume ekspor CPO Indonesia mengalami peningkatan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang meluas (Rahmah et al., 2022). Secara ekonomi kelapa sawit menjadi komoditas unggulan karena dapat tumbuh subur yang akan sangat mudah dibudidayakan di wilayah Indonesia.

Ekspansi kelapa sawit sangat terkait dengan politik nasional. Ini karena pemerintah nasional dan daerah, seperti halnya sektor lain, telah melihat potensinya untuk pembangunan pedesaan dan fiskal, dan dengan demikian telah menggunakan insentif, izin penggunaan lahan, dan kebijakan pertanian dan perdagangan untuk mendorong pengembangan perkebunan (Pacheco et al., 2017).

Masyarakat memandang ekspansi perkebunan sawit memiliki dampak ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi dampak terhadap lingkungan seperti menurunnya kuantitas air tanah, air yang tercemar, populasi satwa yang mulai berkurang, dan adanya limbah. Industri Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tidak dapat menampung limbah dengan kapasitas yang berlebih yang berakhir meluap ke sungai sehingga terjadi eksternalitas (Saragih et al., 2020).

Bukan hanya itu, laju deforestasi yang terus meningkat akan mengakibatkan pemanasan global, perubahan iklim, penurunan kualitas tanah dan berbagai penyakit (Santoso et al., 2022). Hal ini yang menjadi kekhawatiran terhadap perkebunan kelapa sawit yang berdampak terhadap lingkungan. Kelapa sawit menjadi tanaman yang rakus unsur hara dan

kebutuhan air tinggi lebih dari 1.000 liter/hari dalam 1 hektar kebun kelapa sawit, fungsi hutan yang berubah menjadi hutan monokultur, penurunan kualitas tanah dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik pengolahan kelapa sawit. Bukan hanya lingkungan, sektor sosial juga mengalami banyak tantangan dan hambatan mengenai kepemilikan lahan yang masih belum selesai sampai saat ini. Adanya ketergantungan masyarakat terhadap perkebunan sawit akan memicu berbagai dampak lain yang menjadi pertimbangan dari keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

Minyak sawit memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat lokal di banyak negara produsen berkembang, yang secara substansial berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Namun, perluasan perkebunan kelapa sawit, dalam beberapa kasus, memperburuk ketimpangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh rantai produksi kelapa sawit tidak selalu disertai dengan kondisi kerja yang layak (Lasseter & Daman, 2024).

Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada dampak lingkungan dan ekonomi tanpa mengevaluasi secara mendalam implementasi kebijakan publik yang terkait. Oleh karena itu, analisis komprehensif integrasi tiga aliran kebijakan terhadap dampak kelapa sawit, yang memberikan wawasan untuk penguatan kebijakan berbasis ekonomi hijau dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara mengkaji dari berbagai sumber dan menganalisis untuk kemudian dibahas secara mendalam mengenai informasi yang didapat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Desain

penelitian kualitatif dengan studi literatur memberikan peneliti ruang untuk meninjau lebih jauh pengalaman, sudut pandang dan perhatian terhadap topik penelitian (Creswell, 2014). Data yang digunakan bersumber dari dokumen kebijakan, seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 dan laporan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), jurnal, buku dan berbagai sumber lainnya yang mendukung penelitian. Metode yang digunakan yaitu deskripsi dengan menggambarkan terkait fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan fenomena (Sawo et al., 2021). Dalam proses analisis kebijakan menggunakan teori *Multiple Streams Framework* (MSF) dari John Kingdon (1984) dalam (Widyatama, 2018) yaitu dengan melihat agenda publik melalui *problem stream* (aliran masalah) isu-isu yang berkembang di masyarakat dan menjadi perhatian utama pembuat kebijakan, *policy stream* (aliran kebijakan) sebuah alternatif kebijakan yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan, dan *politics stream* (aliran politik) yang mempengaruhi pengambilan kebijakan. Teori tersebut digunakan dalam menganalisis bagaimana interaksi ketiga elemen mempengaruhi kebijakan kelapa sawit di Indonesia dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kebijakan publik digunakan dalam mempertimbangkan yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan mengenai permasalahan yang dihadapi, tindakan yang dilakukan, dan memberikan alternatif kebijakan yang diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan (Nur & Guntur, 2019).

Problem Stream

Permasalahan yang menjadi perhatian publik jika dianggap mendesak dan signifikan dimana kelompok terdampak atau pembuat kebijakan mampu mengubah

permasalahan tersebut menjadi masalah publik yang mendapatkan perhatian pemerintah (Widyatama, 2018). Permasalahan yang menjadi perhatian yaitu masalah lingkungan, sosial dan ekonomi akibat perkebunan sawit yaitu sebagai berikut :

1. Masalah Lingkungan

Pembukaan lahan untuk kepentingan pertanian komersial menjadi pendorong utama dalam deforestasi di negara tropis dan subtropis yang kemudian disusul pertanian subsisten, yang mengakibatkan 80% deforestasi (Rautner et al., 2013). Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia menyatakan bahwa deforestasi merupakan perubahan yang terjadi secara permanen dari hutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia (Redd, 2014). IPOSS menyatakan bahwa deforestasi bukan disebabkan karena perluasan lahan sawit tetapi karena kebijakan pengusaha hutan di Kementerian Kehutanan dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1970 kemudian Kebijakan Transmigrasi dan pertanian berpindah (IPOSS, 2024). Keberadaan sawit membuat padang rumput dan tanah gundul menjadi perkebunan. Hal ini menimbulkan perdebatan yang pro kontra dikarenakan sifat akar sawit yang dapat menghabiskan 20 liter setiap harinya sehingga akan menghilangkan air tanah dan mematikan tanaman lain disekitar sawit. Akan tetapi, sawit bisa hidup ditanah yang kurang subur sehingga memanfaatkan tanah tersebut.

Selanjutnya, Indonesia menjadi penyumbang emisi ketiga sehingga suhu meningkat, intensitas hujan meningkat berakibat banjir, perubahan iklim yang akan mengganggu proses ketahanan pangan, naiknya suhu dan permukaan air laut yang mengancam biota laut (Wahyuni & Suranto, 2021). Bahaya ancaman kebakaran hutan, erosi tanah dan penurunan kualitas tanah. Bukan hanya mengancam bagi keanekaragaman hayati hutan tetapi mengancam masyarakat marginal sekitar

hutan (Hadi Putra et al., 2019). Akan tetapi, masih mengalami berbagai tantangan dalam sektor lingkungan yang mengkhawatirkan sehingga dalam proses perencanaan ekspansi kelapa sawit harus selalu dilakukan pengawasan dan adanya peraturan yang jelas agar pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak menjadi permasalahan kedepannya. Seharusnya pemerintah mengatur konservasi tanah dan air, menyerap karbon, menyediakan oksigen, dan kawasan lindung (Purba, 2017). Namun, dalam pelaksanaannya ISPO menghadapi tantangan dan proses sertifikasi tidak ada keterlibatan masyarakat lokal sehingga tidak ada transparansi. Pelanggaran lingkungan oleh perusahaan besar tidak mendapatkan sanksi yang tegas.

2. Masalah Sosial

Banyaknya konflik yang terjadi diantara masyarakat membutuhkan peran pemerintah dalam menyelesaikan berbagai konflik dan memberikan aturan yang jelas dan adil. Permasalahan mengenai konflik yang dikarenakan batas lahan yang terjadi karena menyerobot, merebut dan jaul beli sengketa dan berbagai konflik lainnya. Bukan hanya terkait lahan tetapi mengenai limbah dan kerusakan infrastruktur jalan (Suryadi et al., 2020). Dalam penyelesaiannya mengalami perubahan bukan secara adat tetapi melalui gugatan hukum. Berikut merupakan hasil penelitian berbagai konflik yang terjadi berdasarkan pola ekspansi.

Tabel 1. Pemetaan konflik perkebunan kelapa sawit berdasarkan pola ekspansi

Pola Ekspansi	Objek Konflik	Jenis Konflik	Tahun Konflik	Keterangan
Pola PIR-Trans	- Tata Batas lahan PT.SBP	Konflik tenurial	1989-2003	
	- Perebutan Areal Pemukiman Eks SP IV PT.SBP	Konflik tenurial	2004-2012	
	- Kebijakan CSR	Konflik non tenurial	2011	
	- Konflik jalan	Konflik non tenurial	2011	
Pola NKPA	- Tata letak kebun	Konflik tenurial	2009-2011	
	- Ganti rugi lahan	Konflik tenurial	2011-2012	
	- Distribusi lahan	Konflik tenurial	2010	Belum terselesaikan
	- Penyerahan Lahan	Konflik tenurial	2010	Belum terselesaikan
	- Tata kelola RKPA	Konflik non tenurial	2012	Belum terselesaikan
Pola PKS tanpa kebun	- Peran Kepala Desa	Konflik non tenurial	2018	
	- Pencemaran limbah	Konflik tenurial	2008-2018	
	- Kebakaran lahan	Konflik tenurial	2018	
	- Pembayaran TBS	Konflik non tenurial	2016-2018	
Pola jual beli lahan	- Penunggakan gaji pegawai	Konflik non tenurial	2016	Belum terselesaikan
	- jual beli lahan bersengketa	Konflik tenurial	2014	Belum terselesaikan
	- Penerbitan SKGR	Konflik tenurial	2014	Belum terselesaikan
Pola hibah	- Tata batas	Konflik tenurial	2015	
Pola mandiri	- Perambahan lahan Perusahaan	Konflik tenurial	2012	Belum terselesaikan

Sumber : (Suryadi et al., 2020).

Dampak sosial mengenai konflik perusahaan dengan masyarakat diakibatkan adanya kebijakan dan pengelolaan yang memberikan izin usaha masih lemah yang menjadi penyebab tumpang tindih areal kepemilikan. Penegakan hukum dengan pembukaan lahan dengan cara pembalakan liar dan kebakaran hutan dilakukan karena tidak ada batas-batas yang jelas. Ini berakibat dalam penanganan yang lambat, kompleks dan tidak adanya keadilan (Hadiyan et al., 2017).

Kemudian, terjadi perubahan cara hidup masyarakat yang disebabkan karena kaum marginal yang tinggal dekat dengan hutan akan kehilangan sumber mata pencaharian dan beralih menjadi buruh tani di perkebunan sawit yang akan berakibat pada ketergantungan masyarakat. Dalam menjalankan pekerjaan, petani swadaya (perkebunan rakyat) sawit sering mengabaikan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang menyebabkan kecelakaan kerja, pemerintah belum memberikan perhatian khusus dalam menyediakan layanan jasa kesehatan masyarakat pedesaan karena akses yang sulit sehingga banyak yang lebih memilih menggunakan pengobatan tradisional (Saragih et al., 2020). Akan tetapi, sawit memberikan konflik yang belum terselesaikan. Sehingga, tujuan untuk memepererat dan pemersatu bangsa (Purba, 2017) belum bisa dirasakan masyarakat.

3. Masalah Ekonomi

Hilirisasi sawit di Indonesia mulai dilakukan akan tetapi masih didominasi produk antara (*intermediate product*) yang nilai tambahnya masih relatif rendah. Sehingga, perlu dilakukan hilirisasi lebih lanjut jika menginginkan nilai tambah yang lebih tinggi dan juga memperluas pasar CPO untuk stabilitas rantai pasok. Indonesia menjadi pemasok minyak sawit terbesar sehingga akan sangat mempengaruhi stabilitas pasar dunia (PASPI, 2021). Kebijakan Uni Eropa yang melarang impor

minyak kelapa sawit berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi signifikan bagi Indonesia, sebagai salah satu produsen utama minyak kelapa sawit dunia, mengingat Uni Eropa merupakan salah satu pasar ekspor terbesar setelah India dengan volume ekspor mencapai 4,78 juta ton, yang jika dihentikan, dapat menyebabkan kehilangan devisa sekitar US\$ 858 juta (setara dengan Rp 12 triliun pada kurs Rp 14.000 per dolar AS), berdasarkan harga minyak kelapa sawit (CPO) sebesar US\$ 572,5 per ton (Rahayu & Sugianto, 2020).

Policy Stream

Dalam proses ini, beberapa aktor seperti pemerintah, advokat, dan akademisi untuk mengajukan berbagai alternatif kebijakan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan (Widyatama, 2018). Pemerintah sebagai penentu kebijakan memilih alternatif terbaik untuk kemudian dapat diimplementasikan. Kemudian, dapat melakukan evaluasi sebagai bagian dalam proses analisis kebijakan.

Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) telah ditetapkan dan diberlakukan standar pembangunannya oleh Pemerintah Indonesia tahun 2011 (Fahamsyah & Pramudya, 2017). ISPO adalah standar keberlanjutan yang diwajibkan bagi perusahaan sawit di Indonesia. Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai sistem ISPO memiliki tiga aspek yaitu substansi hukum yang memiliki payung hukum yang kuat, aspek aparatur hukum dan kelembagaan dalam melakukan penyelenggaraan lebih sempurna dan kuat, dan aspek budaya hukum yang diharuskan dapat menyamakan persepsi terkait dengan pengertian dan konsep pembangunan berkelanjutan untuk mengelola dan mengembangkan kelapa sawit Indonesia.

Dikarenakan hutan Indonesia menjadi hutan produksi yang terbuka untuk kegiatan ekonomi maka pemulihan dan

modal alam sangat kompetitif. Akan tetapi, pengembangan Konsesi Restorasi Ekosistem (KRE) tidak mendapatkan kepastian regulasi dan risiko. Kemudian, membuat alternatif pemakaian lahan sebagai hutan produksi untuk minyak sawit dan kayu. Ini juga akan berpengaruh terhadap pengamanan ekosistem hutan melihat peluang dalam program pertumbuhan ekonomi hijau Pemerintah Indonesia menyatakan harga karbon USD2.57/ton dan investasi KRE akan impas bahkan harga sekitar USD 9,3/ton mengalahkan skenario "Business As Usual" (Global Green Growth Institute, 2022). Konsep Pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi hijau yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sistem ekonomi regional dan nasional (Purba, 2017) yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk itu, perlu adanya kebijakan yang tegas sehingga sawit ini bukan hanya dinikmati oleh pemilik perusahaan swasta yang memiliki luas lahan yang lebih banyak dibandingkan pribadi dan negara.

Program biodiesel memiliki manfaat yaitu sebagai bauran energi yang dapat mengurangi gas rumah kaca yang dapat mendukung *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Perkembangan manufakturisasi sawit ke arah hilirisasi yang membuat biodiesel dapat menyerap tenaga kerja, nilai tambah dalam produk turunan minyak sawit dan peningkatan konsumsi CPO dapat menjaga harga tandan buah sawit. Hal ini yang memberikan kesejahteraan petani sawit, memberikan dukungan kemandirian energi Indonesia sehingga mengurangi ketergantungan konsumsi dan impor minyak solar sehingga memperkuat neraca perdagangan (IPOSS, 2024).

Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit. Dampaknya positif terhadap pengurangan emisi karbon dan meningkatkan permintaan *Crude Palm Oil* (CPO). Namun, implementasinya

menghadapi hambatan seperti kurangnya komunikasi antar lembaga: Koordinasi antara Kementerian Pertanian, ESDM, dan pemangku kepentingan lain belum optimal. Keterbatasan kapasitas teknis petani kecil: Banyak petani kesulitan memenuhi standar produksi biodiesel. Kesenjangan distribusi manfaat perusahaan besar lebih banyak menikmati keuntungan dibandingkan petani kecil.

Pemerintah harus melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan sehingga tidak semakin menghilangkan hutan, diversifikasi pertanian yang akan membantu masyarakat agar tidak kehilangan lahan untuk bertahan hidup, dan moratorium deforestasi. Pemerintah harus membuat kebijakan yang dilakukan untuk menghentikan penerbitan izin baru dalam pembukaan lahan karena perkembangan tahun ke tahun semakin banyak dan hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Hal ini, akan sangat mempengaruhi perkebunan kelapa sawit dan dilakukan reformasi agrarian yang memiliki tujuan dalam restrukturisasi kepemilikan secara lebih terkontrol dan adil sehingga kekayaan yang dimiliki negara juga digunakan untuk memakmurkan rakyat, dan penurunan kebakaran lahan (Purnomo et al., 2017; Sulistiyono et al., 2024).

Sebagian besar keberhasilan Indonesia dalam memperluas perkebunan kelapa sawit disebabkan oleh kenyataan bahwa Indonesia membuka ekonomi nasional untuk investasi asing, dan menarik kelompok perusahaan internasional yang mapan (Pacheco et al., 2017). Kemudian, pemerintah sebagai pihak yang melakukan kontrol untuk menghentikan penerbitan izin baru dalam pembukaan lahan karena perkembangan tahun ke tahun semakin banyak dan hanya dikuasai oleh segelintir orang saja yang akan sangat mempengaruhi perkebunan kelapa sawit, kemudian dilakukan reformasi agrarian yang memiliki tujuan dalam restrukturisasi kepemilikan secara lebih terkontrol dan adil sehingga kekayaan yang dimiliki negara juga

digunakan untuk memakmurkan rakyat, dan penurunan kebakaran lahan (Purnomo et al., 2017; Sulistiyono et al., 2024). Diharapkan pemerintah fokus terhadap peremajaan sawit yang merupakan proses untuk memperbaharui perkebunan sawit yang berkelanjutan dan berkualitas dengan mengurangi risiko pembukaan lahan baru secara illegal (IPOSS, 2024). Peremajaan sawit sudah diatur dalam peraturan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, pada pasal 15 dijelaskan kriteria peremajaan yaitu tanaman sudah lebih dari 25 tahun, tingkat produktivitas kurang lebih 10 ton dari usia 7 tahun, dan benih yang digunakan tidak unggul yang menyebabkan umur tanaman paling sedikit 2 tahun (Menteri Pertanian, 2019). Tinggal proses pengawasan yang seharusnya lebih ketat mengingat banyaknya perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Politics Stream

Kelompok kepentingan atau kelompok yang tidak terhubung dengan seseorang di dalam pemerintahan, permasalahan akan mudah menjadi agenda pemerintah jika memiliki kepentingan yang sama dengan kepentingan pembuat kebijakan (Widyatama, 2018). Sektor pertanian berkontribusi 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sektor perkebunan 3,76 persen, sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan total menyumbang 30,32 persen (BPS, 2023) dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 16,2 juta pekerja. Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (BPS, 2023) menyatakan bahwa kelapa sawit menjadi komoditas utama dalam perekonomian di Indonesia bukan hanya menghasilkan minyak nabati tetapi juga memiliki manfaat dalam sektor industri seperti bahan bakar (biodiesel).

Hal ini yang akan menjadi pertimbangan penting pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Faktor eksternal seperti adanya kebijakan internasional yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan perubahan dalam regulasi impor minyak sawit. Kemudian, adanya komitmen yang dilakukan Indonesia dalam SDGs dan Paris *Agreement* yang berpengaruh terhadap kebijakan nasional. Permasalahan yang dialami dalam negeri dimana kebijakan yang dibuat bisa dilonggarkan karena adanya kepentingan yang dimiliki antara pengusaha dan pemerintah. Hal ini yang memicu masyarakat melakukan berbagai protes karena kerusakan yang terus bertambah dan konflik masyarakat terkait dengan perkebunan sawit. Masyarakat memiliki ketertarikan dalam perkebunan sawit yang harus diikuti dengan regulasi untuk mengatur skema perdagangan yang tepat dalam persaingan harga (Saragih et al., 2020). Konflik lahan menjadi isu utama dalam pengelolaan sawit, dengan berbagai kasus tumpang tindih lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan besar. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya regulasi yang adil memperburuk masalah ini. Untuk itu, perlu komitmen yang jelas dari pemerintah untuk tidak memberikan izin memperluas wilayah lahan sawit sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Kelapa sawit memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia melalui kontribusinya terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, sektor ini menghadapi tantangan besar terkait dampak lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran, serta konflik sosial mengenai kepemilikan lahan dan ketimpangan antara perusahaan besar dan petani kecil. Oleh karena itu, pengelolaan

kelapa sawit memerlukan penguatan kebijakan yang lebih efektif, termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga, transparansi, serta pelibatan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis menggunakan *Multiple Streams* menunjukkan bahwa kebijakan terkait dampak kelapa sawit dalam pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh interaksi antara masalah yang diidentifikasi, solusi yang tersedia, dan dinamika politik.

Implikasi

Penting bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang ada, seperti Program Biodiesel B30 dan ISPO, dengan meningkatkan pengawasan, reformasi agraria, serta peremajaan sawit untuk memastikan keberlanjutan sektor ini. Selain itu, kebijakan yang lebih inklusif dan adil diperlukan agar manfaat ekonomi dari kelapa sawit dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama petani kecil. Dengan demikian, kelapa sawit dapat terus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia tanpa merugikan lingkungan atau masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2023). *Statistika Kelapa Sawit Indonesia 2022* (Issue 16). Badan Pusat Statistika.
- Creswell, J. . (2014). *Desain Penelitian : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Sage Publications.
- Fahamsyah, E., & Pramudya, E. P. (2017). Sistem ISPO Untuk Menjawab Tantangan Dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu - Ilmu Sosial Indonesia*, 43(1), 65–79. <https://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/718/520>
- Global Green Growth Institute. (2022). *Green Growth in Practice: Lessons from Country Experiences*.
- Hadi Putra, A., Oktari, F., & Meidini Putriana, A. (2019). Deforestasi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 10(2), 191–200.
- Hadiyan, Y., Pambudi, H., & Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan tanaman Hutan, B. (2017). Memahami dan Membangun Pendekatan Penyelesaian Deforestasi dan Degradasi Hutan di Region Sumatera dan Kalimantan. *Proceeding Biology Education Conference*, 14, 166–169. <https://blog.cifor.org>
- Hidayat, A. A. dan M. K. (2020). *Industri Sawit Serta Dampak Ekonomi, Sosial Dan Lingkungannya* (D. I. Setyowati (ed.); Issue August). Penerbit Wahana Resolusi. <https://www.researchgate.net/publication/343787702>
- IPOSS. (2024). *Sawit Anugerah yang Perlu Diperjuangkan*. PT Kompas Media Nusantara.
- Lasseter, D., & Daman, A. (2024). Total reward preferences in the recruitment and retention of county chief administrative officers: Applying a push/pull theory of motivation. *Public Administration Review*, 0(0), 173–181. <https://doi.org/10.1111/puar.13635>
- Menteri Pertanian. (2019). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit*.
- Nugraha, R. et al. (2024). *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau* (Vol. 1, Issue January). <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=KdntEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&dq=5.%09Mengidentifikasi+peluang+untuk+pengurangan+emisi+di+masa+depan:+Mengusulkan+solusi+i>

- novatif+dan+strategi+yang+dapat+dii
mplementasikan+untuk+mengurangi+
emisi+GRK+di+industri+
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, April, 147. https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISI_S_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf
- Pacheco, P., Gnych, S., Dermawan, A., Komarudin, H., & Okarda, B. (2017). The palm oil global value chain: Implications for economic growth and social and environmental sustainability. *The Palm Oil Global Value Chain: Implications for Economic Growth and Social and Environmental Sustainability*. <https://doi.org/10.17528/cifor/006405>
- PASPI. (2021). Economic Sustainability Industri Sawit Indonesia: Review Dan Isu Strategis. *Palm Oil Journal*, II(42).
- Purba, J. H. V. dan T. S. (2017). Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, 43, 81-94. <https://doi.org/10.4324/9781003490111-1>
- Purnomo, H., Okarda, B., Dermawan, A., Ilham, Q. P., & Bizarani, B. (2017). Proyeksi Sawit Indonesia: Debat kebijakan ekonomi, deforestasi dan moratorium. *Diskusi Dan Konferensi Pers "Sawit: Penyebab Atau Penyelamat Deforestasi" Yang Diselenggarakan Oleh Thamrin School Climate Change and Sustainability*, April, 1-37.
- Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 224-236. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439>
- Rahmah, K., Napitupulu, D., & Yanita, M. (2022). Analisis Dampak Kebun Kelapa Sawit Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 105-114. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.505>
- Rautner, M., Leggett, M., & Davis, F. (2013). *Buku kecil pendorong besar deforestasi*. 11-225.
- Redd, F. D. (2014). *Reducing Emissions from Deforestation*. 466, 1-4.
- Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). (2022). *Renewables 2022 Global Status Report*.
- Santoso, R., Ratnawati, H., & Riyanti, D. (2022). Indonesian Journal of Conservation i j Klusterisasi Tingkat Deforestasi: Ekologi Kewarganegaraan Indonesia. *Indonesian Journal of Conservation*, 11(1), 34-38. <https://doi.org/10.15294/ijc.v11i1.35941>
- Saragih, I. K., Rachmina, D., & Krisnamurthi, B. (2020). Analisis Status Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Provinsi Jambi. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 8(1), 17-32. <https://doi.org/10.29244/jai.2020.8.1.17-32>
- Sawo, M. K., Rogi, O. H. A., & Lakat, R. S. M. (2021). Analisis Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan Di Distrik Muara Tami. *Jurnal Spasial Vol. 8 No. 3, 2021 ISSN 2442-3262*, 8(3), 311-325.
- Sulistiyono, K., Nasri, M., Ramadhan, M. R., & Saripudin, A. (2024). Kebijakan Reforma Agraria Dalam Menjamin Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Indonesia. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 229-234. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v>

1i2.2244

- Suryadi, S., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2020). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit : Persoalan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kab. Pelalawan, Riau). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 367–374. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.367-374>
- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.110083>
- Widyatama, B. (2018). Applying Kingdon's Multiple Streams Framework in the Establishment of Law No.13 of 2012 Concerning the Privilege of Yogyakarta Special Region. *Journal of Government and Civil Society*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.643>
- World Bank. (2021). *World Development Report 2021: Data for Better Lives*.